

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik dan pertentangan kerap muncul antara pelaksana kebijakan dengan pihak perumus kebijakan. Pada praktiknya, proses pembuatan kebijakan tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai aktor utama, namun juga mencakup peran masyarakat dan swasta. Keterlibatan tersebut tidak selalu berlangsung melalui forum formal dalam formulasi kebijakan, melainkan juga terjadi melalui komunikasi informasi yang berkembang di antara para aktor yang terlibat.

Kebijakan yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat dapat memicu perlawanan dari kelompok kepentingan yang merasa dirugikan terhadap dampak kebijakan tersebut. Pada dasarnya kebijakan publik harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok, dan kepentingan negara secara keseluruhan, sehingga tidak semua pihak akan merasa puas dengan keputusan yang diambil¹. Gagasan tersebut sejalan dengan pandangan Sawir yang menekankan bahwa kebijakan publik memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, kompleksitas ini terjadi karena kebijakan harus mengakomodasi berbagai kepentingan yang sering kali bertentangan, sehingga tidak dapat sepenuhnya memenuhi ekspektasi semua individu².

¹ Andi Cudai Nur dan Muhammad Guntur, "Analisis Kebijakan Publik," Makassar: Publisher UNM, 2019.

² Muhammad Sawir, *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik* (Deepublish, 2021).

Kehadiran gerakan masyarakat sipil tidak terlepas dari negara yang menerapkan demokrasi. Fenomena ini menunjukkan bentuk partisipasi publik yang berfungsi sebagai instrumen relasi kekuasaan antara warga dengan pihak yang memiliki otoritas, yaitu pemerintah. Gerakan masyarakat sipil menjadi penyeimbang terhadap dominasi kekuasaan negara, sekaligus menjadi wadah untuk mendorong perubahan sosial serta merespons kebijakan publik yang dinilai merugikan kepentingan publik. Perubahan tersebut merupakan proses yang melibatkan berbagai entitas yang memiliki peran setara dan saling melengkapi dalam transformasi sosial³.

Di negara berkembang, gelombang protes masyarakat umumnya tidak muncul tanpa latar belakang yang jelas. Ketidakpuasan yang bersumber dari kesenjangan antara harapan dan realitas, atau *deprivasi realitve* menjadi faktor yang mendorong lahirnya aksi protes publik. Kondisi ini sering kali dipicu oleh proses pembangunan yang tidak dirasakan secara merata sehingga manfaat kesejahteraan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Ketimpangan ini menumbuhkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat, terutama ketika kebijakan publik disusun tanpa melibatkan partisipasi publik secara memadai dan lebih berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu⁴.

Salah satu bentuk dari gerakan masyarakat sipil adalah demonstrasi. Kegiatan demonstrasi merupakan kegiatan gerakan sosial yang bertujuan untuk menekan atau mempengaruhi kebijakan pemerintah dan organisasi tertentu melalui aksi massa yang terorganisir⁵. Aksi demonstrasi sering kali dipicu oleh ketidakpuasan terhadap

³ Puspitasari Irma, *ADVOKASI KEBIJAKAN JARINGAN PEREMPUAN PESISIR (JPrP) DALAM PEMBANGUNAN WATER FRONT CITY (WFC)*, 2011.

⁴ Ibid.

⁵ Sanny Nofrima dan Zuly Qodir, "Gerakan Sosial Baru Indonesia: Studi Gerakan Gejayan Memanggil 2019," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 1 (2021): 185.

kebijakan sosial, ekonomi, atau politik yang dianggap merugikan sebagian masyarakat⁶.

Dewasa ini teknologi berkembang dengan sangat pesat, akses dan komunikasi menjadi mudah dan cepat, dimana jarak bukan lagi menjadi sebuah halangan utama. Melalui sambungan nirkabel, setiap orang mampu mengakses apa yang diinginkan dan dibutuhkan. Perkembangan ini menjadi manfaat besar bagi peradaban manusia dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Dengan adanya perkembangan teknologi, informasi menjadi lebih cepat untuk didapatkan, bahkan dapat dikatakan informasi mampu didapatkan secara *realtime* kepada khalayak banyak.

Transformasi dunia digital adalah hal yang tidak dapat dihindari, nyatanya teknologi saat ini menjadi sendi dalam kehidupan. Transformasi digital muncul bersama dengan hadirnya teknologi digital yang ditandai dengan adanya peralihan informasi analog menuju digital, selain itu adanya otomatisasi melalui perkembangan teknologi dan informasi⁷.

Transformasi digital kemudian menghadirkan transisi pada masyarakat luring menuju masyarakat daring. Transisi ini memunculkan kebiasaan baru dalam kesehariannya. Salah satu kebiasaan baru yang dialami yaitu penggunaan media sosial. Munculnya kebiasaan baru ini menjadikan media sosial sebagai saluran media informasi yang dipercaya masyarakat. Masifnya penggunaan media sosial sebagai sarana informasi yang digunakan masyarakat kemudian dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori. Pertama, media sosial sebagai sarana informasi yang digunakan

⁶ Ibid.

⁷ Sascha Kraus dkk., "Digital transformation: An overview of the current state of the art of research," *Sage Open* 11, no. 3 (2021): 21582440211047576.

masyarakat untuk menambah pengetahuan (*well informed citizen*)⁸. Kedua, media sebagai sarana interaksi, media sosial memungkinkan komunikasi dua arah antara komunikator yang antara keduanya dapat berganti peran⁹. Ketiga, media sosial sebagai ruang partisipasi publik yang memungkinkan terbentuk mobilisasi massa melalui berbagai gerakan kolektif¹⁰. Keempat, media sosial sebagai instrumen yang mendukung proses desentralisasi dengan mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kehadiran media membuka ruang publik untuk berpartisipasi dalam praktik demokrasi, termasuk dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, baik pada tingkat lokal maupun nasional¹¹.

Media sosial menjadi kekuatan baru pembentuk ruang publik. Perkembangan media sosial menjadi ruang publik kemudian digunakan sebagai penyalur partisipasi dan pergerakan masyarakat. Selain itu, media sosial juga digunakan sebagai sarana advokasi, sebagai forum untuk membangun kritik sosial. Berbagai macam kritik yang muncul dalam media sosial dapat dilihat melalui komentar yang dibuat yang kemudian dapat berkembang menjadi sebuah forum diskusi yang membahas terkait isu publik. Hingga saat ini media sosial memiliki kontribusi pada pengembangan politik partisipatoris pada warga negara.

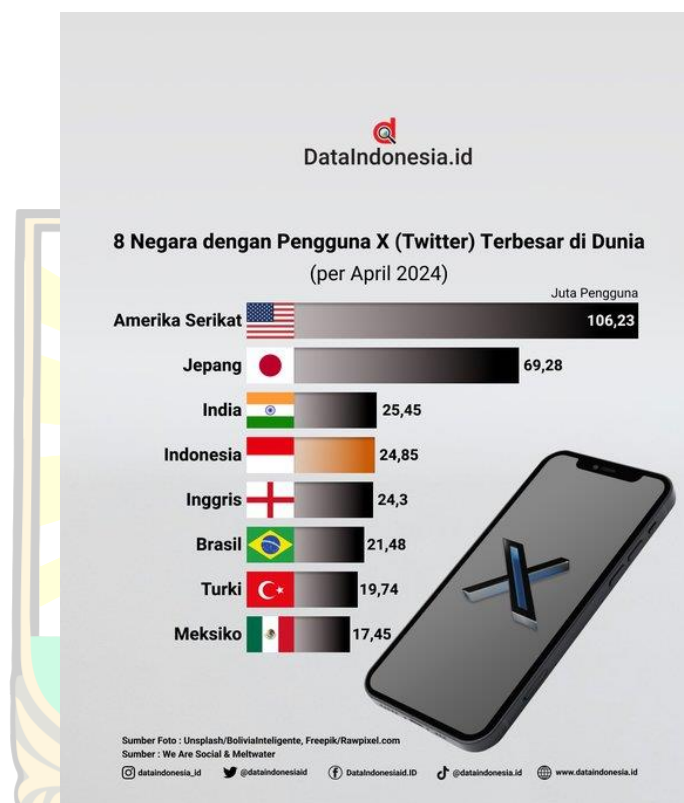
⁸ Eliana E. Gallardo-Echenique dkk., "Digital competence in the knowledge society," *MERLOT Journal of Online Learning and Teaching* 11, no. 1 (2015).

⁹ John B. Thompson, "Mediated Interaction in the Digital Age," *Theory, Culture and Society* 37, no. 1 (Januari 2020): 3–28, <https://doi.org/10.1177/0263276418808592>.

¹⁰ Mikko Villi dan Janne Matikainen, "Participation in social media: Studying explicit and implicit forms of participation in communicative social networks," *Media and communication* 4, no. 4 (2016): 109–17.

¹¹ Veronica Hamid, "Angin Harapan Demokrasi Digital, Nostalgia Demokrasi Klasik, Transformasi Ruang Publik, dan Politisasi Media Sosial," *Jakarta: KPG*, 2014.

Gambar 1.1
10 Negara dengan Jumlah Pengguna Pengguna Twitter Terbanyak di Dunia 2024



Sumber: Dataindonesia.id, 2024.

Dewasa ini, sosial media berkembang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai sarana berinteraksi di ruang digital maupun untuk memperoleh berbagai informasi. Selain Facebook dan Instagram, salah satu *platform* sosial media yang banyak digunakan adalah Twitter atau X. Dikutip dari dataindonesia.id, Indonesia berada pada posisi ke 4 dunia sebagai pengguna Twitter terbanyak dengan 24,85 juta pengguna. X merupakan *platform* media sosial berbasis *microblogging* yang memiliki tingkat popularitas tinggi. Melalui layanan ini, pengguna

dapat menyampaikan opini secara langsung¹². Pengguna X juga bebas untuk mengungkapkan opini terkait isu politik, sosial serta berbagai topik yang sedang menjadi perhatian publik¹³.

Media sosial telah mendorong munculnya berbagai kritik sosial, bahkan media sosial juga digunakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai sarana interaktif antar warga negara demi menciptakan masyarakat yang dinamis di Nigeria¹⁴. Sementara itu, India menjadikan platform X sebagai sarana kampanye anti korupsi. Kemudian di Ukraina menjadikan media sosial sebagai sarana untuk membangkitkan partisipasi dan kesadaran perpolitikan masyarakat selama berlangsungnya gelombang protes pada tahun 2013-2014¹⁵. Fenomena ini juga terjadi di Indonesia, tagar #ReformasiDikorupsi yang sempat ramai dibicarakan di X pada tahun 2020 menjadi bukti bahwa media sosial juga dimanfaatkan sebagai ruang mobilisasi aksi massa, mendorong pemberdayaan publik, serta menyampaikan kritik sosial terhadap kebijakan yang dihasilkan. Selain itu, pengguna media sosial juga berkontribusi dalam memperkuat praktik dan kelembagaan demokrasi Indonesia¹⁶.

Peran media sosial dalam mempengaruhi kebijakan publik juga tampak pada fenomena *viral based policy*, di mana viralitas menjadi penentu respons pemerintah terhadap suatu isu. Fenomena *Viral based policy* seringkali dikaitkan dengan konotasi

¹² Syahril Dwi Prasetyo, Shofa Shofiah Hilabi, dan Fitri Nurapriani, "Analisis Sentimen Relokasi Ibukota Nusantara Menggunakan Algoritma Naïve Bayes dan KNN," *Jurnal KomtekInfo*, 2023, 1–7.

¹³ Angelina Puput Giovani dkk., "Analisis Sentimen Aplikasi Ruang Guru Di Twitter Menggunakan Algoritma Klasifikasi," *Jurnal Teknoinfo* 14, no. 2 (2020): 115.

¹⁴ Crystal Armstrong dan Charity Butcher, "Digital civil society: How Nigerian NGOs utilize social media platforms," *International Journal of Politics, Culture, and Society* 31 (2018): 251–73.

¹⁵ Alexander Ronzhyn, "Social media activism in post-euromaidan Ukrainian politics and civil society," *Proceedings of the 6th International Conference for E-Democracy and Open Government, CeDEM 2016*, 12 Desember 2016, 96–101, <https://doi.org/10.1109/CeDEM.2016.17>.

¹⁶ Ari Ganjar Herdiansah, Luthfi Hamzah Husin, dan Hendra Hendra, "Religious Identity Politics on Social Media in Indonesia: A Discursive Analysis on Islamic Civil Societies," *Jurnal Studi Pemerintahan* 9, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.18196/jgp.2018.0186.187-222>.

negatif, karena suatu kebijakan baru mendapat perhatian serius setelah dibahas secara intensif di media, khususnya media sosial¹⁷. Salah satu kasus *viral based policy* di Indonesia adalah dibatalkannya pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada Tahun 2024, revisi UU Pilkada ini sempat menjadi *trending topic* di media sosial terutama di X melalui tagar #KawalPutusanMK dan gambar Burung Garuda bertuliskan “Peringatan Darurat”. Penggunaan tagar #KawalPutusanMK di media sosial X berkembang secara massif, dimana tagar ini trending urutan pertama di kolom pencarian, serta mencapai 2,43 juta kali cuitan, 77 juta kali *repost*, *reply* dan *like*¹⁸. Fenomena ini menunjukkan bahwa adanya kekuatan kolektif masyarakat dalam mempengaruhi arah kebijakan publik, viralitas dapat menjadi bentuk nyata dari partisipasi politik secara digital yang efektif¹⁹.

Memasuki era digital, media sosial berkembang menjadi *platform* utama bagi masyarakat untuk beropini terhadap berbagai isu. Salah satu *platform* yang paling sering digunakan untuk diskusi kebijakan adalah X, yang memungkinkan pengguna menyampaikan pendapat secara langsung melalui komentar, unggahan, dan penggunaan tagar²⁰. Saat ini X memiliki 24 juta pengguna di Indonesia, pengguna menjadikan X sebagai ruang digital yang aktif dalam menyebarkan opini dan membentuk wacana publik mengenai kebijakan pemerintah²¹.

¹⁷ Dian Kurnia Hafsari, Achluddin Ibnu Rochim, dan Hasan Ismail, “Social Network Analysis Pada Fenomena Viral Based Policy Melalui Platform X Pada Pembatalan,” *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi PUblik* 5, no. 02 (2025): 4.

¹⁸ *Ibid.*, 7.

¹⁹ *Ibid.*, 10.

²⁰ Eliana Esther Gallardo-Echenique dkk., “Let’s talk about digital learners in the digital era,” *International Review of Research in Open and Distributed Learning* 16, no. 3 (2015): 156–87.

²¹ Ayu Monavia Rizaty, “Daftar Negara Pengguna X Terbanyak di Dunia per April 2024, Indonesia Keempat,” 24 Juli 2024, <https://dataindonesia.id/internet/detail/daftar-negara-pengguna-x-terbanyak-di-dunia-per-april-2024-indonesia-keempat>.

Peran ini juga terlihat dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Media sosial berperan penting dalam mendokumentasikan dan menganalisis reaksi masyarakat terhadap program ini. Berbagai unggahan, komentar, dan diskusi daring mencerminkan sentimen publik terhadap kebijakan tersebut, baik dalam bentuk dukungan maupun kritik. Analisis sentimen di media sosial memungkinkan pemerintah dan peneliti untuk mengidentifikasi tren opini masyarakat, mengukur tingkat kepuasan publik, serta memahami faktor yang memicu reaksi terhadap kebijakan tersebut²².

Lahirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak terlepas dari kondisi kesehatan masyarakat yang mengkhawatirkan. Prevalensi stunting Indonesia berada pada angka 19,8%²³, angka ini hanya sedikit berada di bawah target dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 20%²⁴. Jika dilihat dari prevalensi stunting berdasarkan provinsi, provinsi Nusa Tenggara Timur (36,8%), Sulawesi Barat (35,4%), Papua (35,4%), Aceh (28,6%), dan Nusa Tenggara Barat (26,8%) menjadi lima provinsi teratas di Indonesia yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di Indonesia²⁵. Tingginya prevalensi stunting ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk merealisasikan poin ke dua pembangunan berkelanjutan (SDGs) yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian yang berkelanjutan. Jika dibiarkan, stunting akan berdampak buruk pada kualitas sumber daya manusia Indonesia dan akan mengurangi kemungkinan Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi 2045.

²² Helen Z. Margetts dkk., "Leadership without leaders? Starters and followers in online collective action," *Political Studies* 63, no. 2 (2015): 278–99.

²³ Kementerian Sekretariat Negara RI, "Prevalensi Stunting Indonesia Turun ke 19,8%," 2025, <https://stunting.go.id/prevalensi-stunting-indonesia-turun-ke-198/>.

²⁴ Marina Ery Setiyawati dkk., "Studi literatur: keadaan dan penanganan stunting di Indonesia," *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 2 (2024): 183.

²⁵ Kemenkes, *Survey Status Gizi Indonesia 2024* (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025).

Permasalahan stunting berakar pada isu pemenuhan gizi nasional. Meskipun Indonesia mengalami perkembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, negara ini tetap dihadapkan pada fenomena *triple burden of malnutrition*, yaitu kondisi gizi kurang, kelebihan gizi, serta kekurangan zat gizi mikro²⁶. Tingginya prevalensi stunting dan gizi buruk mengindikasikan bahwa anak-anak di Indonesia masih menghadapi kendala dalam pertumbuhan fisik maupun perkembangan kognitifnya. Ketidakmerataan gizi dan akses terhadap makanan bergizi semakin memperburuk situasi, terutama di daerah yang terbatas akses, ketersediaan, dan kualitas pangannya²⁷.

Rendahnya kualitas, kuantitas dan akses pangan menjadi salah satu alasan utama munculnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Program ini diinisiasi sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi gizi masyarakat sekaligus mendorong perubahan perilaku konsumsi menuju pola makan bergizi seimbang, khususnya bagi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia balita²⁸.

Pelaksanaan program dimulai pada 6 Januari 2025 melalui skema implementasi bertahap yang menjangkau seluruh jenjang pendidikan dan daerah kabupaten/kota, sembari menjaga stabilitas fiskal jangka panjang²⁹. Program ini menargetkan sebanyak 17.980.263 penerima manfaat hingga akhir tahun 2025, mencakup anak dalam fase tumbuh kembang, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui³⁰.

²⁶ Badan Gizi Nasional, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025* (2025), 2.

²⁷ Badan Gizi Nasional, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025*.

²⁸ Ibid.

²⁹ Reni Saptati, "Pemerintah Salurkan Makan Bergizi Gratis (MBG), Ini Sasaran Utama Penerimaannya - Media Keuangan," 17 Februari 2025, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/pemerintah-salurkan-makan-bergizi-gratis-mbg-ini-sasaran-utama-penerimaannya>.

³⁰ Ibid.

Pendanaan Program Makan Bergizi Gratis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, yang direalisasikan melalui mekanisme bantuan pemerintah. Anggaran tersebut diwujudkan melalui paket bantuan MBG yang disalurkan oleh Badan Gizi Nasional, dengan nilai bantuan sebesar Rp15.000 per penerima manfaat, disesuaikan dengan harga pasar serta standar minimal pemenuhan gizi yang telah ditetapkan (Tabel 1.1). Pembiayaan ini mencakup pengadaan bahan pangan, biaya operasional seperti listrik, gas, upah tenaga dapur, pembelian bahan bakar minyak, serta kebutuhan pendukung lainnya. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk biaya sewa, meliputi peralatan dapur, alat memasak, perlengkapan makan, penyewaan kendaraan, dan kebutuhan operasional lainnya³¹.

Tabel 1.1
Rujukan Angka Kecukupan Gizi Harian menurut kelompok umur sasaran

| NO | Kel Sasaran | Energi Total (kkal) | Energi (kkal) | Protein (gr) | Lemak (gr) | Karbohidrat (gr) | Waktu Pemberian | Rujukan % AKG |
|----|-------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Siswa TK/PAUD | 328 | 23,4 | 25 | 23,7 | 20,9 | Makan pagi | 20-25% AKG Harian |
| 2 | Siswa SD/MI (kelas 1-3) | 368,8 | 22,3 | 23,1 | 24,1 | 20,1 | Makan pagi | 20-25% AKG Harian |

³¹ Badan Gizi Nasional, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025*, 12.

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|------|------|------|------|----------------|-------------------------|
| 3 | Siswa SD/MI (kelas 4-6) | 531 | 32,2 | 33,1 | 30,9 | 31 | Makan siang | 30-35% AKG Harian |
| 4 | Siswa SMP/MTs | 719 | 32,3 | 34,8 | 30,7 | 30,8 | Makan siang | 30-35% AKG Harian |
| 5 | Siswa SMA/SMK/MA | 762,5 | 32,1 | 36,4 | 31 | 30,4 | Makan siang | 30-35% AKG Harian |
| 6 | SLB | Mengikuti kebutuhan gizi sesuai kelompok usia | | | | | | |
| 7 | Ibu Hamil | 818 | 33,3 | 40,4 | 32,1 | 31,9 | Makan siang | 30-35% AKG Harian |
| 8 | Ibu Menyusui | 818 | 31,9 | 52,9 | 32,2 | 30,8 | Makan siang | 30-35% AKG Harian |
| 9 | Anak Balita | 342 | 24,4 | 47,6 | 21,6 | 20,6 | Makan siang | 30-35% AKG Harian |

Sumber: Olahan peneliti, 2025.

Kedadaan tersebut dapat membebani APBN, terutama jika diperlukan tambahan subsidi untuk mengimbangi selisih biaya yang timbul dari kenaikan harga pangan serta mahalnnya distribusi. Di sisi lain, realokasi anggaran juga berimplikasi pada pembagian dana antar kementerian terkait, yang berpotensi menekan pendanaan bagi program strategis lainnya.

Selain itu, efek *policy spillover* juga perlu diperhatikan, karena Program ini tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan, namun juga pada sektor pertanian, perekonomian, dan sistem anggaran negara. *Policy spillover* merujuk pada efek lanjutan dari sebuah kebijakan di satu bidang yang kemudian mempengaruhi bidang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung³². Fokus program pada keterjangkauan harga membuka kemungkinan meningkatnya penggunaan pangan impor, yang dapat menggeser posisi hasil pertanian lokal di pasar. Dampaknya, pendapatan petani berpotensi menurun, sementara tekanan terhadap harga komoditas domestik dapat melemahkan daya tarik sektor pertanian bagi masyarakat. Di sisi lain, peningkatan kebutuhan terhadap komoditas tertentu berisiko memicu pemanfaatan lahan secara berlebihan yang dapat mengganggu kesuburan tanah dan keseimbangan lingkungan. Dominasi aktor besar dalam sistem distribusi memungkinkan terjadinya tekanan terhadap petani kecil dan menengah, sehingga berpotensi memperbesar disparitas ekonomi di bidang pertanian. Selain itu, besarnya alokasi anggaran program ini dapat memengaruhi ruang fiskal pemerintah karena berpotensi mengurangi porsi pendanaan bagi sektor lain, seperti pendidikan dan infrastruktur, yang juga memiliki peran strategis dalam pembangunan manusia serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang.³³

Pelaksanaan program makan bergizi gratis memerlukan ketersediaan bahan pangan dalam jumlah besar, seperti beras, daging, ikan, dan susu. Peningkatan kebutuhan tersebut dapat mendorong sektor pertanian untuk memperluas produksi, sehingga membuka peluang manfaat ekonomi bagi petani lokal. Di sisi lain, kenaikan permintaan yang tinggi

³² Susan L. Moffitt, Michaela Krug O'Neill, dan David K. Cohen, "4 Problems of Policy Spillover," dalam *Reforming the Reform* (University of Chicago Press, 2023), 65–91.

³³ Igor Francetic dkk., "Framework for identification and measurement of spillover effects in policy implementation: intended non-intended targeted non-targeted spillovers (INTENTS)," *Implementation science communications* 3, no. 1 (2022): 30.

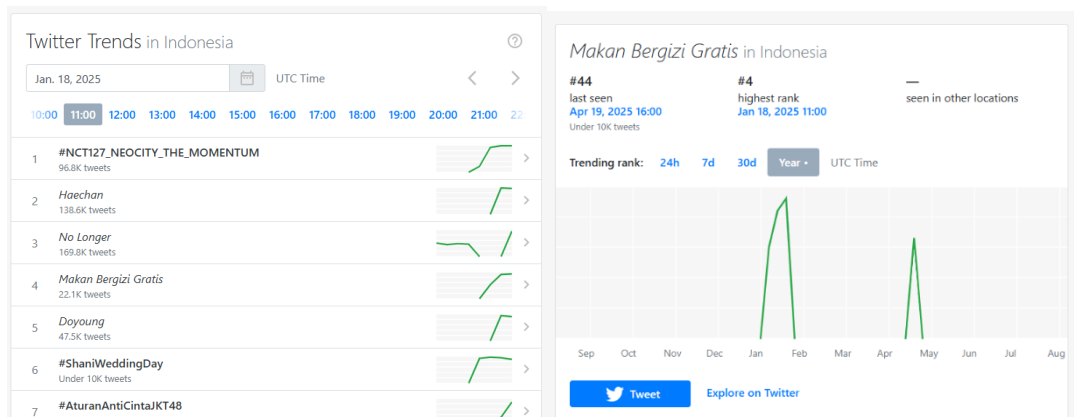
juga berpotensi menimbulkan sejumlah tantangan, antara lain ketidakstabilan harga, kebutuhan penguatan infrastruktur pendukung, serta risiko terhadap keberlanjutan lingkungan³⁴. Oleh sebab itu, perancang kebijakan perlu mempertimbangkan berbagai faktor tersebut secara komprehensif agar sektor pertanian mampu menopang implementasi program makan bergizi gratis secara berkelanjutan.

ecara sosial dan ekonomi, meskipun program ini diharapkan mampu meningkatkan gizi serta partisipasi pendidikan, pengelolaan dana yang kurang maksimal berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti meningkatnya ketergantungan masyarakat pada bantuan negara. Tanpa strategi penguatan kapasitas ekonomi masyarakat, implementasi program ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang seperti peningkatan beban utang negara serta kemungkinan tekanan inflasi. Efek *spillover* dari kebijakan ini walaupun dirancang untuk memperbaiki kondisi gizi dan meningkatkan partisipasi pendidikan, kebijakan ini berisiko menciptakan ketergantungan jika tidak didukung oleh strategi yang memperkuat ekonomi masyarakat³⁵. Tanpa kebijakan pendamping yang tepat, dampak jangka panjangnya bisa mencakup peningkatan beban fiskal negara serta tekanan inflasi yang lebih besar.

³⁴ Ibid.

³⁵ Jaime Espinosa-Tasón dkk., "Socioeconomic impact of 2005–2008 drought in Andalusian agriculture," *Science of The Total Environment* 826 (2022): 154148, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154148>.

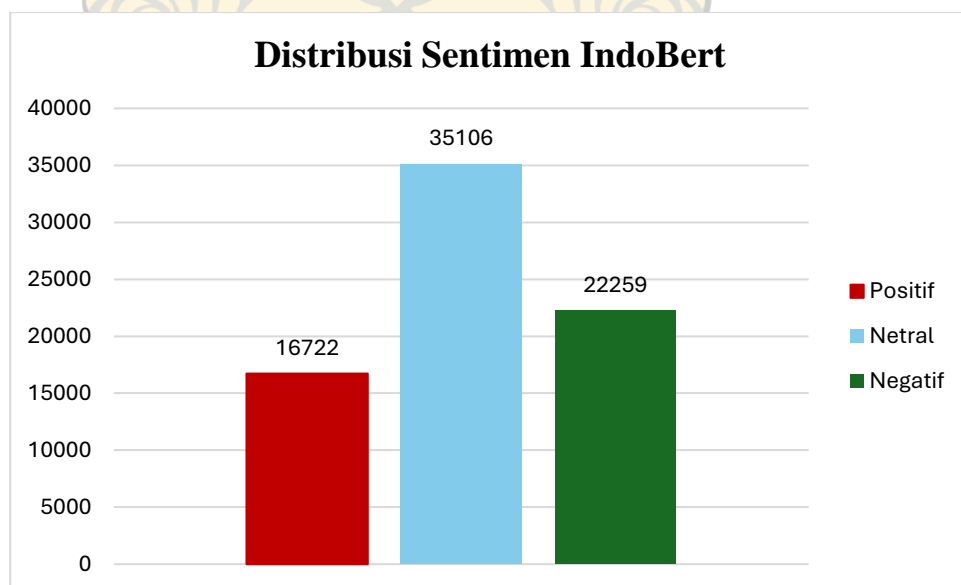
Gambar 1.2
Tren Twitter di Indonesia



Sumber: Screenshot dari *getdaytrens.com*, diakses pada 12 Agustus 2025.

Sejak peluncurnya, MBG menjadi sorotan publik di media sosial, hal ini terbukti dengan munculnya 22 ribu cuitan di X dengan kata kunci “Makan Bergizi Gratis”. Banyaknya cuitan ini menjadikan kata kunci Makan Bergizi Gratis menjadi trending topik ke empat di Indonesia di media sosial X pada 18 Januari 2025, namun pada 19 April 2025 kata kunci Makan Bergizi Gratis turun ke posisi 44 di trending topik X. Fenomena ini memperlihatkan bawa masyarakat memiliki atensi yang tinggi terhadap Program Makan Bergizi Gratis.

Gambar 1.3
Distribusi Sentimen Menggunakan IndoBERT



Sumber: Olahan Peneliti melalui Orange Data Mining, 2025.

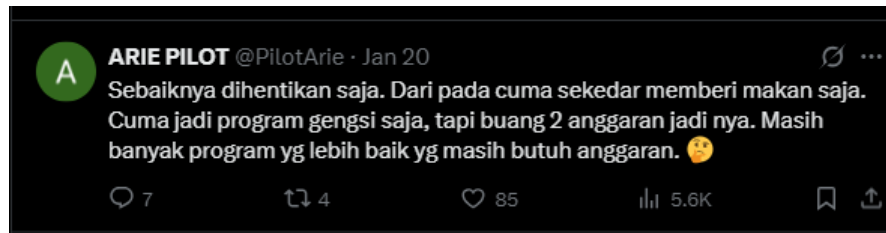
Analisis awal yang dilakukan peneliti menggunakan model IndoBERT terhadap 74.087 cuitan di media sosial X pada periode waktu 6 Januari hingga 19 April 2025 menunjukkan hasil distribusi sentimen publik yang beragam. Sentimen didominasi oleh sentimen netral dengan jumlah 35.106 cuitan (47,64%), kemudian diikuti sentimen negatif sebanyak 22.259 cuitan (30,23%), dan sentimen positif sebanyak 16.722 cuitan (22,13%). Dominasi sentimen netral menunjukkan bahwa sebagian besar cuitan memberikan komentar berupa pertanyaan, saran, atau diskusi terbuka terkait dari implementasi program. Sementara itu, sentimen negatif yang cukup tinggi menunjukkan kritikan dari masyarakat, khususnya terkait kualitas makanan, transparansi anggaran, dan efektivitas kebijakan. Di lain sisi, sentimen positif menyoroti manfaat program. Hal ini mengindikasikan bahwa media sosial berperan sebagai cerminan pandangan masyarakat, sehingga persepsi yang terbentuk dapat berdampak pada legitimasi dan sustainabilitas kebijakan pemerintah.

Gambar 1.4
Cuitan Pengguna X dengan Sentimen Negatif, 2025



Sumber: Screenshot dari salah satu pengguna X @litopansolawase, diakses pada 6 Mei 2025.

Gambar 1. 5
Cuitan Pengguna X dengan Sentimen Negatif, 2025



Sumber: Screenshot dari salah satu pengguna X @PilotArie, diakses pada 6 Mei 2025.

Berdasarkan gambar 1.3 dan gambar 1.4, terlihat bahwa program makan bergizi gratis menuai beragam opini negatif dari warganet, yang mencerminkan munculnya ketidakpuasan publik terhadap implementasi program tersebut. Salah satu tanggapan datang dari akun @PilotArie yang menyampaikan bahwa program ini sebaiknya dihentikan saja karena dianggap hanya menjadi program simbolik tanpa dampak signifikan. Ia menilai bahwa kegiatan tersebut lebih terkesan sebagai ajang pencitraan politik daripada sebagai solusi nyata atas permasalahan gizi, apalagi dengan penggunaan anggaran ganda yang dinilai tidak efisien. Menurutnya, masih banyak program lain yang lebih layak dan mendesak untuk mendapatkan pendanaan. Kritik senada juga disampaikan oleh akun @litopansolawase yang mengungkapkan ironi dari program tersebut. Ia menyindir bahwa meskipun anak-anak diberi makan gratis sekali sehari, para orang tuanya justru mengalami pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan dengan dalih penghematan anggaran, yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara prioritas kebijakan dan kondisi riil masyarakat. Opini tersebut mencerminkan adanya problematika mendasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kritik yang muncul bukan semata menolak idenya, tetapi lebih kepada bagaimana program ini dieksekusi dan apakah benar-benar berpihak pada rakyat atau hanya menjadi alat legitimasi politik tanpa memperhatikan efisiensi anggaran dan dampak sosial.

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Salah satu isu yang sering mendapat perhatian adalah

kualitas makanan yang dianggap belum sesuai dengan standar gizi yang diharapkan, sehingga pelaksanaan program dinilai belum berjalan secara maksimal³⁶. Selain itu, pelaksanaan program menunjukkan variasi antarwilayah, yang mengindikasikan adanya kesenjangan kapasitas dalam penyediaan makanan bergizi secara berkelanjutan³⁷. Berbagai tantangan tersebut menegaskan perlunya penguatan sistem pengawasan serta evaluasi yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan MBG.

Gambar 1.6
Cuitan Pengguna X terkait Permasalahan yang Timbul dari Program Makan Bergizi Gratis



Sumber: Screenshot dari salah satu pengguna X @kumparan, diakses pada 6 Mei 2025.

³⁶ Rimbawan Rimbawan dkk., "School lunch programs and nutritional education improve knowledge, attitudes, and practices and reduce the prevalence of anemia: a pre-post intervention study in an Indonesian Islamic boarding school," *Nutrients* 15, no. 4 (2023): 1055.

³⁷ Ishak Halim Octawijaya dkk., "Parent Willingness to Pay for School Feeding Programs in Junior High Schools in Malang Regency, Indonesia," *Nutrients* 15, no. 14 (2023): 3212.

Gambar 1.7

Cuitan Pengguna X Terkait Buruknya Kualitas Makanan Program Makan Bergizi Gratis



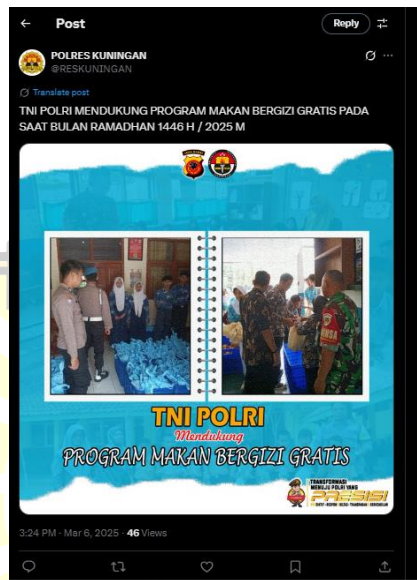
Sumber: Screenshot dari salah satu pengguna X @BBCIndonesia, diakses pada 6 Mei 2025.

Gambar 1.5 dan Gambar 1.6 merepresentasikan permasalahan serius dalam pelaksanaan program MBG di Indonesia, khususnya terkait kualitas dan keamanan makanan yang disediakan. Pada Gambar 1.5 yang diunggah oleh akun @kumparan, dilaporkan bahwa 40 orang siswa SDN Dukuh 03 di Sukoharjo mengalami keracunan setelah mengonsumsi ayam krispi yang merupakan bagian dari menu MBG. Peristiwa ini tidak hanya memunculkan kekhawatiran publik, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan mutu makanan dalam program tersebut. Sementara itu, Gambar 1.6 dari akun @BBCIndonesia memperlihatkan testimoni seorang staf sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menyatakan bahwa makanan MBG yang diberikan dalam kondisi tidak layak konsumsi, bahkan menyebabkan siswa sakit perut dan trauma untuk makan. Kedua unggahan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program MBG belum merata dan belum memenuhi standar yang seharusnya, terutama dalam hal higienitas, kandungan gizi, serta kontrol mutu makanan. Hal ini menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola

program MBG agar benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.

Gambar 1.8

Cuitan Pengguna X Terkait Dukungan Terhadap Program Makan Bergizi Gratis



Sumber: Screenshot dari salah satu pengguna X @PRESKUNINGAN, diakses pada 6 Mei 2025.

Gambar 1.9

Cuitan Pengguna X Terkait Dukungan Terhadap Program Makan Bergizi Gratis



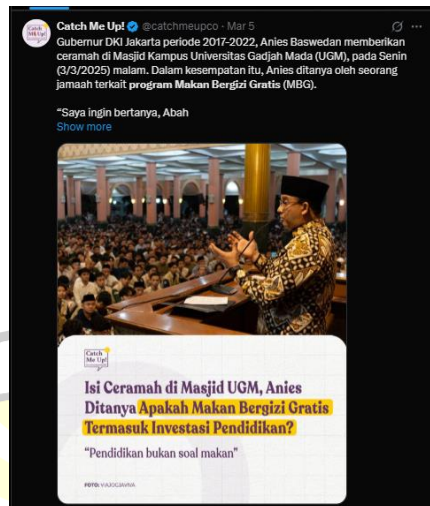
Sumber: Screenshot dari salah satu pengguna X @TanjiroKam18369, diakses pada 6 Mei 2025.

Di samping berbagai kritik dan tantangan yang muncul, tidak sedikit pula masyarakat dan institusi yang menunjukkan dukungan terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Salah satunya terlihat dari unggahan akun resmi Polres Kuningan (@RESKUNINGAN) pada gambar 1.7 yang menampilkan keterlibatan TNI dan Polri dalam mendukung dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat selama bulan Ramadhan 1446 H/2025 M. Hal ini menunjukkan bahwa institusi negara ikut memperkuat pelaksanaan program dan memastikan akses gizi bagi masyarakat.

Selain itu, dukungan juga datang dari masyarakat sipil seperti yang ditunjukkan oleh akun @TanjiroKam18369 pada gambar 1.8 yang menyampaikan ajakan untuk bersama-sama menyukseskan program MBG sebagai bagian dari perubahan menuju masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Melalui unggahan itu, masyarakat menilai MBG berperan dalam meringankan tanggung jawab orang tua terkait penyediaan makanan anak, serta membuka peluang belajar yang lebih baik karena kebutuhan gizi lebih terpenuhi. Narasi semacam ini menunjukkan bahwa terdapat optimisme publik terhadap keberhasilan program jika dilaksanakan secara tepat dan terukur. Unggahan-unggahan tersebut merupakan cerminan sentimen positif yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi kebijakan secara menyeluruh, agar tidak hanya fokus pada resistensi, tetapi juga mengidentifikasi dukungan sebagai potensi keberlanjutan program.

Gambar 1.10

Cuitan Pengguna X Dengan Sentimen Netral Terhadap Program Makan Bergizi Gratis



Sumber: Screenshot dari salah satu pengguna X @catchmeupco, diakses pada 6 Mei 2025.

Gambar 1.11

Cuitan Pengguna X Dengan Sentimen Netral Terhadap Program Makan Bergizi Gratis



Sumber: Screenshot dari salah satu pengguna X @pikiran_rakyat, diakses pada 6 Mei 2025.

Selain sentimen positif dan negatif, terdapat pula tanggapan masyarakat yang bersifat netral terhadap kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sentimen netral ini umumnya berbentuk pertanyaan, diskusi terbuka, atau saran kebijakan yang tidak secara eksplisit menunjukkan dukungan maupun penolakan. Salah satu contoh dapat ditemukan dalam unggahan akun @catchmeupco pada gambar 1.9, yang melaporkan bahwa dalam

sebuah kesempatan publik, salah seorang jamaah bertanya kepada Anies Baswedan mengenai apakah program MBG termasuk bentuk investasi pendidikan atau tidak. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memilih untuk memahami terlebih dahulu logika kebijakan yang diambil pemerintah, alih-alih langsung menilai secara emosional.

Opini netral juga tercermin dari pernyataan Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin pada gambar 1.10 yang menyarankan agar masyarakat dapat dilibatkan dalam pembiayaan program MBG melalui skema donasi sukarela. Usulan tersebut tidak serta-merta mendukung ataupun menolak kebijakan MBG, namun berusaha menanggapi tantangan anggaran dengan menawarkan alternatif partisipatif dalam pembiayaan publik. Kedua contoh ini mencerminkan bahwa sebagian masyarakat memosisikan diri secara reflektif terhadap kebijakan, tidak bersifat reaktif, namun memilih berdiskusi secara konstruktif. Tanggapan-tanggapan semacam ini penting diperhatikan karena menunjukkan adanya bentuk keterlibatan masyarakat yang tidak didorong oleh emosi, melainkan oleh keingintahuan, kehati-hatian, dan kehendak untuk memperbaiki kebijakan dari dalam proses dialog kebijakan itu sendiri.

Selain itu, pelaksanaan MBG juga berfungsi sebagai sarana edukasi publik untuk menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya pemenuhan gizi yang seimbang bagi anak³⁸. Program ini memperoleh perhatian yang cukup besar dari masyarakat maupun akademisi karena dipandang sebagai salah satu alternatif solusi dalam mengatasi persoalan gizi dan kesehatan anak. Meski demikian, manfaat yang diharapkan hanya dapat terwujud apabila pelaksanaannya dikelola secara optimal serta selaras dengan ketentuan kebijakan

³⁸ Rahma Nida dan Dwi Darma Puspita Sari, "School meals program and its impact towards student's cognitive achievement," *Journal of Economics Research and Social Sciences* 7, no. 1 (2023): 69–80.

yang berlaku. Dari sisi regulasi, masih terdapat celah yang berpotensi memengaruhi efektivitas implementasi MBG.

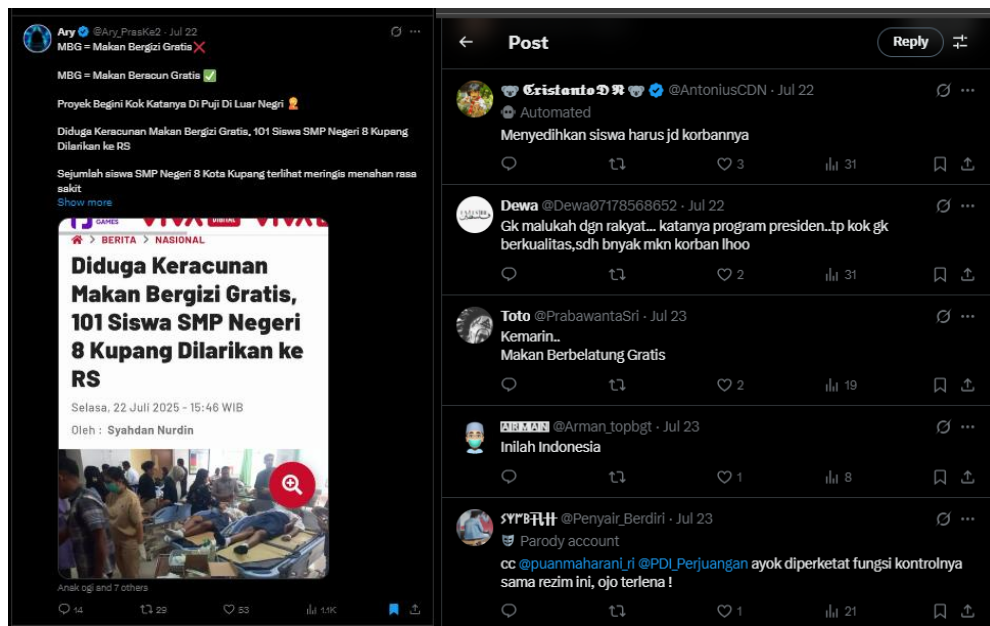
Regulasi terkait standar gizi dan tata kelola program ini sebenarnya telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, pada tahap pelaksanaan masih sering ditemukan ketidaksesuaian antara arah kebijakan dengan implementasi di lapangan³⁹. Sebagai contoh, sejumlah sekolah menghadapi kendala dalam memperoleh bahan pangan yang memenuhi standar yang telah ditentukan. Di samping itu, keterbatasan anggaran serta kurangnya pelatihan bagi pihak pengelola makanan di sekolah turut memperparah kondisi tersebut⁴⁰. Masalah lain yang muncul adalah belum optimalnya kerja sama antar pemangku kepentingan, yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan program. Literatur menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi sering berdampak pada manajemen yang kurang efisien, termasuk dalam memastikan keberlanjutan penyediaan gizi⁴¹. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terpadu dan menyeluruh dalam pengelolaan MBG agar kebijakan yang dirancang dapat diterapkan secara optimal. Salah satu konsekuensi yang muncul adalah rendahnya tingkat partisipasi siswa dalam program makan bergizi gratis. Sebagian orang tua masih meragukan kualitas makanan yang disediakan, sehingga dukungan terhadap pelaksanaan program menjadi terbatas.

³⁹ Rimbawan dkk., "School lunch programs and nutritional education improve knowledge, attitudes, and practices and reduce the prevalence of anemia: a pre-post intervention study in an Indonesian Islamic boarding school."

⁴⁰ Octawijaya dkk., "Parent Willingness to Pay for School Feeding Programs in Junior High Schools in Malang Regency, Indonesia."

⁴¹ Rimbawan dkk., "School lunch programs and nutritional education improve knowledge, attitudes, and practices and reduce the prevalence of anemia: a pre-post intervention study in an Indonesian Islamic boarding school."

Gambar 1.12
Opini Publik dan Respons Pemerintah di Media Online



Sumber: Screenshot dari cuitan @Ary_PrasKe2 dan balasan cuitannya serta berita informasi.com. diakses pada 12 Agustus 2025.

Fenomena keracunan yang dialami siswa SMPN 8 Kota Kupang setelah menyantap bantuan MBG yang kemudian direspons dengan permintaan maaf dari Badan Gizi Nasional memperlihatkan bahwa sentimen di media sosial memberikan tekanan terhadap kebijakan. Pada Juli 2025, tercatat 140 siswa di SMPN 8 Kota Kupang mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan yang berasal dari Program MBG. Peristiwa ini dengan cepat

menjadi viral di media sosial X, ditandai dengan beredarnya tangkapan layar dan opini publik yang mempersoalkan kualitas pelaksanaan program ini. Beberapa cuitan menyampaikan kekecewaan dan kritik tajam terhadap program ini seperti, “menyedihkan siswa harus jd korbannya”, “gk malukah dgn rakyat ... katanya program presiden..tp kok gk berkualitas, sdh bnyak mkn korban lhoo”, “Kemarin... Makan Berbelatung Gratis”.

Pola tersebut mengindikasikan bahwa ruang publik digital bukan sekadar wadah ekspresi, tetapi juga berperan sebagai mekanisme kontrol sosial-politik yang bersifat kolektif. Situasi ini semakin diperkuat dengan permintaan maaf yang disampaikan Badan Gizi Nasional pada 5 Agustus 2025 kepada orang tua siswa yang terdampak keracunan di Kota Kupang. Ini menjadi bukti bahwa opini publik di media sosial dapat membentuk tekanan yang dapat memaksa aktor negara untuk bertindak dan merespons secara terbuka. Fenomena ini memperlihatkan peran media sosial sebagai arena pertarungan wacana dan sekaligus sebagai mekanisme akuntabilitas baru di era digital.

Dampak dari kegagalan implementasi tersebut berpotensi mengganggu kondisi kesehatan serta capaian akademik siswa, sehingga manfaat positif yang diharapkan dari program ini berkurang⁴². Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendekatan komunikasi yang tepat menjadi kunci dalam mendorong keterlibatan publik dan membangun legitimasi program. Dalam konteks ini, komunikasi pembangunan berfungsi sebagai instrumen penting untuk memastikan keberhasilan MBG, karena mampu menjembatani jarak antara desain kebijakan dan implementasinya. Berbagai kajian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat program,

⁴² Ibid.

mendorong partisipasi orang tua, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah⁴³.

Komunikasi yang disusun secara jelas dan terstruktur turut mendukung terciptanya sinergi yang lebih solid antara sekolah, pemerintah, serta masyarakat⁴⁴. Penelitian lain menunjukkan bahwa program yang melibatkan partisipasi masyarakat sejak proses perencanaan hingga implementasi cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi⁴⁵. Keterlibatan masyarakat dalam proses komunikasi dapat membantu menyesuaikan implementasi program dengan kebutuhan lokal, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efektif dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Di samping itu, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam komunikasi berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan program⁴⁶. Komunikasi pembangunan dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi publik mengenai pentingnya pemenuhan gizi serta kontribusi MBG dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Penyampaian informasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami memungkinkan masyarakat memahami manfaat program secara lebih menyeluruh sehingga dukungan terhadap pelaksanaannya meningkat. Selain itu, strategi komunikasi yang tepat juga berperan dalam mereduksi resistensi maupun kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat⁴⁷.

⁴³ Juliana F. W. Cohen dkk., “Universal school meals and associations with student participation, attendance, academic performance, diet quality, food security, and body mass index: a systematic review,” *Nutrients* 13, no. 3 (2021): 911.

⁴⁴ Rimbawan dkk., “School lunch programs and nutritional education improve knowledge, attitudes, and practices and reduce the prevalence of anemia: a pre-post intervention study in an Indonesian Islamic boarding school.”

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Caitlin Wall dkk., “The impact of school meal programs on educational outcomes in African schoolchildren: A systematic review,” *International journal of environmental research and public health* 19, no. 6 (2022): 3666.

⁴⁷ Nida dan Sari, “School meals program and its impact towards student’s cognitive achievement.”

Sejalan dengan yang disampaikan Anderson bahwa kebijakan publik adalah hasil dari proses kompleks yang terdiri dari beberapa tahap, mulai dari identifikasi masalah, formulasi kebijakan, adopsi, implementasi, hingga evaluasi. Dalam setiap tahap tersebut, terdapat potensi kegagalan yang dapat muncul, seperti lemahnya desain kebijakan, pelaksanaan yang tidak efektif, atau adanya resistensi dari kelompok sasaran⁴⁸. Kasus keracunan siswa dan buruknya kualitas makanan dalam program MBG menunjukkan bahwa kegagalan terjadi terutama pada tahap implementasi. Meskipun program MBG dirancang untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah, namun kenyataannya belum mampu menjamin mutu dan keamanan makanan yang diberikan. Hal ini membuktikan keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada tujuan kebijakan dibuat, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Bahkan, kebijakan yang dirancang untuk memberi manfaat dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak dilaksanakan dengan standar yang memadai dan pengawasan yang ketat.

Meskipun banyak penelitian telah membahas dampak kebijakan sosial terhadap masyarakat, namun, terdapat kesenjangan dalam studi yang spesifik menganalisis sentimen masyarakat terhadap program MBG melalui media sosial di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menyoroti dampak ekonomi dan sosial dari program bantuan sosial, tanpa mengeksplorasi bagaimana persepsi masyarakat terbentuk dan berkembang melalui interaksi digital⁴⁹. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan pendekatan berbasis analisis sentimen di media sosial, yang memungkinkan pemetaan respons publik secara lebih dinamis dan berbasis data *real-time*.

⁴⁸ James Anderson, *Public policymaking: An introduction*, 2003.

⁴⁹ Riant Nugroho, "Kebijakan publik formulasi, implementasi dan evaluasi," *Jakarta: Elex Media Komputindo*, 2003.

Penelitian ini juga memiliki urgensi yang tinggi karena dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan strategi komunikasi efektif kepada masyarakat. Pemahaman terhadap reaksi publik di media sosial memungkinkan pemerintah menyusun langkah evaluasi yang lebih akurat, memperkuat transparansi, dan mengoptimalkan pelaksanaan program agar selaras dengan harapan masyarakat. Lebih jauh, temuan penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk menggabungkan analisis media sosial dengan evaluasi kebijakan, guna meningkatkan responsivitas program MBG..

Masifnya penggunaan media sosial sebagai ruang diskusi terutama dalam kebijakan publik, analisis sentimen menjadi alat yang perlu digunakan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap program MBG. Pendalaman terhadap sentimen publik dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif, dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang disertakan dengan data tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Analisis Sentimen Publik Pada Media Sosial X Terhadap Program Makan Bergizi Gratis**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana dinamika sentimen publik pada media sosial X terhadap kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan apakah sentimen publik dapat memberikan pengaruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sentimen publik pada media sosial X terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta melihat apakah sentimen publik dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian kebijakan publik dan analisis sentimen digital, khususnya dalam memahami sejauh mana efektivitas sentimen publik di media sosial dapat memengaruhi kebijakan sosial seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak terkait, yaitu:

1. Bagi *stakeholder*, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan mengenai tingkat efektivitas dan arah sentimen masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis, yang dapat digunakan untuk evaluasi dan penyempurnaan kebijakan.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan publik, serta mendorong partisipasi aktif dalam menyampaikan aspirasi guna mewujudkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan publik.

1.5 Sistematika Pembahasan

Bab I – Pendahuluan

Adanya sejumlah isu yang berkembang menjadi dasar ketertarikan peneliti dalam melakukan studi mengenai analisis sentimen publik di platform X terhadap kebijakan Program Makan Bergizi Gratis, kemudian disusun dalam bentuk rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

BAB II – Tinjauan Pustaka

Menguraikan teori atau konsep yang menunjang penelitian ataupun penelitian yang relevan dengan yang diteliti dalam bentuk operasional.

BAB III – Metode Penelitian

Memaparkan unit analisis, prosedur sampling, serta mekanisme pengolahan data melalui penggunaan metode analisis yang selaras dengan tujuan penelitian.

BAB IV – Deskripsi Lokasi Penelitian

Pada bab ini akan menjelaskan media sosial X sebagai lokasi penelitian dan program makan bergizi gratis (MBG) sebagai objek penelitian.

BAB V – Temuan dan Analisis Data

Menjelaskan hasil analisis sentimen pengguna media sosial X terhadap kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BAB VI – Penutup

Berisikan tentang kesimpulan dan saran penelitian.